KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Gedung Baru DPR LSM Curigai Ada Permainan
**Tanggal** : Kamis, 30 April 2015
**Surat Kabar** : Suara Karya
**Halaman** : 3



GEDUNG BARU DPR

# LSM Curigai Ada Permainan

JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah kalangan menolak rencana DPR membangun gedung baru yang menjadi *icon* nasional. DPR dinilai tidak pantas membangun gedung dengan biaya rakyat sebesar Rp 1 triliun, karena selama ini tidak punya prestasi.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencium banyak permainan dalam pembangunan gedung baru DPR yang diperuntukan untuk perpustakaan, museum, dan research center.

Bagaimana tidak, DPR dalam hal ini mengatakan bahwa akan ada anggaran untuk gedung baru pada tahun 2016 dan 2017. Dengan begitu ada kemungkinan DPR telah membuat kesepakatan terselubung dengan perusahaan pelaksana proyek.

"Draftnya saja belum disusun kok DPR bisa bilang bakal ada anggaran, ada apa ini?," kata Peniliti Senior Formappi Lucius Karus kemarin.

Bahkan Formappi menilai kalau Presiden Joko Widodo telah melakukan politik transaksional dengan DPR terkait gedung baru. Sebab, hingga kini Jokowi terkesan melakukan pembiaran terhadap proyek gedung baru, tanpa melihat kebijakannya.

"Harusnya Jokowi bisa melihat pembangunan gedung baru DPR ini secara rinci, ada permainan atau tidak," ujarnya.

Formappi menilai pembangunan gedung baru DPR terlalu dipaksakan. Sebab pembangunan dengan penambahan perpustakaan, museum, dan research center tersebut bukan kebutuhan publik:

Menurut Formappi, publik saat ini melihat kinerja DPR belum maksimal. Oleh karenanya yang kini menjadi persoalan penting bukanlah gedung baru, melainkan meningkatkan kualitas kinerja DPR itu sendiri.

"Gedung baru itu sifatnya tidak terlalu penting. Yang saat ini ditunggu masyarakat adalah hasil kerja dari para anggota DPR," katanya.

Lucius juga menganggap gedung baru DPR tidak pantas disebut ikon nasional. Lantaran yang bisa disebut ikon nasional hanyalah kerja DPR yang mampu menyusun anggaran dengan baik dan melakukan pengawasan Undang-undang termasuk APBN.

"Gedung baru ini hanya bisa menjadi monumen pengingat. Jalankan saja tugas dan fungsi DPR dengan baik, karena amanat rakyat lebih penting ketimbang gedung baru," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo diketahui belum memberikan persetujuan terkait pembangunan gedung baru DPR dengan segala fasilitasnya.

Dalam rapat konsultasi, Presiden hanya membahas tujuan dan fungsi pembangunan.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang memastikan belum ada peraturan presiden (perpres) terkait pembangunan gedung baru DPR.

Namun Andi menyebutkan bahwa yang hendak dibangun bukanlah gedung baru, melainkan penambahan fasilitas di DPR.

**(rul)**